KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Keterbukaan Anggaran Jadi Catatan
Tanggal : Jumat, 31 Desember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Keterbukaan Anggaran Jadi Catatan

DPR selaku perpanjangan tangan, lidah, dan harapan rakyat semestinya bekerja dan bertindak berlandaskan prinsip keterbukaan. Bukan hanya fungsi legislasi yang belum optimal.

Cahya Mulyana
cahya@mediaindonesia.com

DPR dianggap mengabaikan prinsip-prinsip keterbukaan anggaran. Padahal, sejak 2018 DPR berkomitmen untuk menjalankan transparansi keuangan bersama 180 parlemen dunia.

"DPR memiliki reputasi buruk sebagai lembaga publik yang kurang dipercaya. Bahkan beberapa survei publik menilai DPR sebagai lembaga terkorup lantaran mereka masih menutupi informasi keuangan," ujar Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam pada webinar bertajuk Catatan Akhir Tahun Kinerja Fungsi Anggaran DPR: Transparansi Vs Ketertutupan, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Badiul Hadi, dan peneliti senior Formappi M Djadijono.

Roy mengatakan DPR selaku perpanjangan tangan, lidah, dan harapan rakyat semestinya bekerja dan bertindak berlandaskan prinsip keterbukaan. Bukan hanya fungsi legislasi yang belum optimal, penganggaran juga masih menjadi sektor yang tertutup bagi publik.

"Ketertutupan informasi publik terkait dengan penganggaran ditambah lemahnya mekanisme transparansi dan akuntabilitas kinerja parlemen menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR."

Padahal, pada HUT ke-73 DPR pada 28 Agustus 2018 para wakil rakyat telah mendeklarasikan *Open Parliament Indonesia* (OPI). Komitmen OPI itu menandai sejarah panjang perkembangan parlemen terbuka di Indonesia. Tujuannya DPR lebih dekat dengan masyarakat dan semakin memperkuat peran DPR dalam membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik. OPI merupakan merupakan inisiatif global yang dideklarasikan pada 15 Desember 2012 dalam International Parliamentary Union (IPU).

Inisiatif itu didukung 180 organisasi dan 82 negara. Terdapat sejumlah negara yang mendeklarasikan parlemen terbuka itu, seperti Prancis, Georgia, Cile, Ukraina, Kosta Rika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo.

Jadi habitat

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sebagai pengelola anggaran DPR juga tidak memberikan akses leluasa kepada publik untuk mendapatkan informasi. Akibatnya terdapat banyak ruang untuk wakil rakyat terjerembap dalam lumpur tindak pidana korupsi.

"Pemantauan IBC, BURT belum menjalankan prinsip-prinsip penganggaran dan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Bentuknya seperti tidak adanya publikasi dokumen kebijakan tata kelola keuangan dan RKA DPR oleh BURT," ujar Badiul.

Badiul mengatakan catatan merah terhadap DPR dalam pengelolaan keuangan itu disokong juga oleh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Ia mencontohkan penggunaan dana reses anggota DPR yang tidak terpublikasi.

Padahal, kata dia, DPR telah meratifikasi ketentuan transparansi keuangan dengan 180 lembaga serupa di dunia. Sejatinya DPR memberikan informasi yang lebih baik kepada publik untuk seluruh kegiatan, produk legislasi, berikut anggaran.

"Sehingga semangat *open parliament* bisa lebih maksimal tidak hanya formalitas," katanya.

Kondisi tersebut, kata Badiul, memberikan kesempatan bagi anggota DPR untuk lebih leluasa melakukan tindak pidana korupsi. "Misalnya eks Ketua DPR Setya Novanto, bekas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dan juga Azis Syamsuddin. Dalam kurun waktu 2015-2020 lebih dari 25 kasus melibatkan anggota DPR RI, terutama terkait dengan alokasi dana perimbangan," pungkasnya. (P-1)